BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemekaran desa merupakan salah satu cara pembentukan daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Undang-undang yang disebut sebagai Undang-undang pemerintahan daerah). Didalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih." Dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara dalam membentuk daerah baru (Huda et al., 2020).

Pemekaran desa diawali oleh pemberian otomoni daerah kabupaten/kota kepada desa yang memecahkan suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah dan menjadi salah satu cara pembentukan daerah baru sebagai daerah otonomi (Dison et al., 2022). Oleh karena itu, pemekaran desa merupakan salah satu cara agar setiap daerah di desa bisa mengelola serta memberikan efektifitas kelancaran bagi setiap desa dalam mensejahterakan masyarakat dengan pemberian otonomi yang diberikan tersebut.

Adapun tujuan dari pemekaran desa yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan akan demokrasi, percepatan pada perekonomian daerah, percepatan dalam pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan agar terciptanya hubungan serasi antara pusat dan daerah."

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.” (Dison et al., 2022) Dilihat dari beberapa tujuan tersebut, pemekaran desa menjadi salah satu cara agar desa bisa fokus terhadap potensi milik desa sekaligus memperlancar keefektifan administrasi yang ada di desa tersebut. Desa Kasang Kebon Dalam merupakan sebuah desa pemekaran yang berada di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Desa Kasang Kebon dalam diresmikan oleh Bupati Muaro Jambi kala itu, yaitu Masnah Busro pada tahun 2021 (Berita.com, 2021). Desa tersebut merupakan hasil dari pemekaran desa induk yaitu Desa Kasang Pudak yang memecah desa menjadi 2 desa pemekaran. Desa Kasang Kebon Dalam memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.032 jiwa yang diambil dari 11 RT 1 Dusun (DAILY.com, 2021).

Akses yang cepat dan terjangkau menjadikan Desa Kasang Pudak menjadi desa yang padat penduduk, dengan jumlah populasi penduduk di desa ini berjumlah 18.598 jiwa pada tahun 2022 dengan rincian 9.043 perempuan dan 9.555 laki-laki (Pasaribu & Apriansyah, 2023). Oleh karena itu, desa induk tersebut memerlukan pemekaran desa agar wilayah administratif dan pemberian layanan kepada masyarakat lebih optimal. Desa Kasang Kebon dalam sebagai hasil desa pemekaran membutuhkan pembangunan desa yang berbasis Smart Village seperti yang diterapkan oleh desa induk.

Smart village merupakan salah satu program desa berfokus pada konsep desa yang menggunakan basis teknologi tujuannya agar memudahkan kelembagaan desa serta

masyarakat desa dalam mengakses informasi sekaligus mensejahterakan masyarakat lewat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat basis teknologi. Dasar program Smart Village adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang UU Desa (Damarjati, 2021). Smart Village memiliki arti sebuah konsep kebijakan yang mampu mendorong sebuah desa agar mampu dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara cerdas serta agar desa mampu menggunakan teknologi digital guna mengembangkan potensi di tingkat desa serta mensejahterakan masyarakatnya (Maulana et al., 2022).

Smart Village juga termasuk bagian dari Smart City yang dimana mengusung konsep kota/desa pintar. Smart Village menjadi salah satu bentuk dari pembangunan berkelanjutan desa berbasis teknologi. Smart Village termasuk dalam bagian pembangunan berkelanjutan desa yang menggunakan konsep digital seiring dengan perkembangan zaman serta kecanggihan teknologi. Konsep smart village digambarkan pada kawasan pedesaan dan komunitas pedesaan yang telah membangun strategi pembangunan berdasarkan aset dan sumber daya yang ada, serta dengan mengejar beberapa peluang baru terkait teknologi digital baru, jaringan, dan layanan yang mendukung penggunaan pengetahuan dan solusi inovatif yang lebih baik bagi (Adamowicz and Zwolinska-Ligaj, 2020).

Penerapan Program Smart Village di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 3.269 desa atau 4% dari 74.961 desa seluruh Indonesia. Data tersebut berdasarkan hasil dari Survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui Indeks Desa Membangun (IDM) (Kabari.com, 2021). Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks

ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa. Selain itu, Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa (Rumsowek et al., 2023).

Berdasarkan hasil survei terakhir IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dilakukan pada tahun 2024, Kabupaten Muaro Jambi memiliki peringkat Desa Maju dengan nilai rata-rata 0,7592.

Tabel 1. 1 Peringkat IDM Kabupaten Muaro Jambi

Rank	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Rata-Rata IDM Kab. 2024	Status IDM Kab. 2024
161	Lampung	Way Kanan	0.7616	Maju
162	Jawa Barat	Karawang	0.7615	Maju
163	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	0.7612	Maju
164	Jambi	Merangin	0.7610	Maju
165	Gorontalo	Gorontalo	0.7599	Maju
166	Jawa Tengah	Jepara	0.7597	Maju
167	Jawa Timur	Sumenep	0.7593	Maju

168	Jawa Tengah	Sragen	0.7593	Maju
169	Jambi	Muaro Jambi	0.7592	Maju

Sumber : Website Indeks Desa Membangun Republik Indonesia 2024

Berdasarkan hasil survei Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024, desa yang berada di Kecamatan Kumpeh Ulu memiliki peringkat sebagai Desa Maju, dengan nilai rata-rata 0,70748.

Tabel 1. 2 Peringkat IDM Kecamatan Kumpeh Ulu

Rank	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM Kab. 2024	Status IDM Kab. 2024
3.394	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	Tewah	0.7219	Maju
3.395	Kalimantan Tengah	Barito Timur	Raren Batuah	0.7219	Maju
3.396	Kalimantan Selatan	Banjar	Telaga Bauntung	0.7219	Maju
3.397	Jawa Timur	Ngawi	Kasreman	0.7218	Maju
3.398	Jawa Tengah	Banjarnegara	Mandiraja	0.7218	Maju
3.399	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	Buay Madang Timur	0.7217	Maju

3.400	Jawa Tengah	Brebes	Kersana	0.7217	Maju
3.401	Lampung	Lampung Selatan	Way Panji	0.7216	Maju
3.402	Jambi	Muaro Jambi	Kumpeh Ulu	0.7215	Maju

Sumber : Website Indeks Desa Membangun Republik Indonesia 2024

Berdasarkan dari hasil kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Desa Membangun menjadi indikator dalam menentukan sebuah desa menjadi desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal maupun desa sangat tertinggal. Salah satu karakteristik dari desa maju adalah penggunaan teknologi yang kini dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan desa seperti menggunakan DIGIDES (Digital Desa) guna pelayanan dan administrasi desa yang lebih mudah dan tertata dengan baik (Akbar, 2024). Pembangunan desa berkonsep Smart Village pada desa pemekaran menjadi salah satu langkah dalam menjadikan sistem pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien dan berwawasan teknologi setara dengan desa maju lainnya.

Desa pemekaran seperti Desa Kasang Kebon Dalam memerlukan konsep pembangunan berkelanjutan bagi kemajuan desa, sehingga penerapan Smart Village menjadi salah satu faktor penting. Ditemukan bahwa dalam pengurusan anggaran pembangunan dan pelaporan rencana infrastruktur desa masih membutuhkan perizinan dari desa induk, dan masa desa pemekaran menjadi desa definitif masih menunggu hingga tahun 2025, dikarenakan pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pilkada secara nasional. Selain itu, pada keterbukaan informasi kepada masyarakat masih dilakukan secara manual dengan menempelkan spanduk ataupun pamflet seperti struktur organisasi, ataupun realisasi anggaran yang dipergunakan secara abstrak sehingga

masyarakat tidak memiliki akses informasi lain yang cukup seperti demografi, geografi wilayah ataupun laporan transparansi hasil kegiatan desa.

Perlu diterapkannya konsep Smart Village agar desa pemekaran tersebut siap mengelola sistem pemerintahannya sendiri, memberikan layanan efektif dan efisien kepada masyarakat serta keterbukaan informasi secara menyeluruh. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu terkait kesiapan desa pemekaran yang menggunakan konsep Smart Village dalam melihat pembangunan di desa. Hal ini menjadi acuan penulis dalam menganalisis kesiapan sebuah desa pemekaran dalam penggunaan konsep Smart Village dengan permasalahan yang diangkat serta dapat menemukan bagaimana perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian terdahulu.

Untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan permasalahan yang benar-benar baru dan belum ada diteliti dari segi persamaan, maupun korelasi. Agar dapat memberikan kebermanfaatan ilmu pengetahuan bagi penelitian tersebut.

Penelitian dengan judul “Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran” Kajian ini berfokus pada :

SINERGITAS pelaksanaan program smart village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yaitu, dengan menggunakan teori indikator Herdiana (2019) bahwa, Pemerintah Desa Hanura telah memanfaatkan teknologi informasi kedalam pemerintahannya (smart government), mengajak masyarakat untuk berpartisipasi (smart community), memanfaatkan lingkungan alam dan sosial (smart environment) dalam pelaksaan kegaiatan smart village di Desa

Hanura. Serta menggunakan teori sinergitas dan teori indikator Doctoroff (Dewi, 2020), yang menyimpulkan bahwa sinergitas cukup baik, karena dari Pemerintah Desa hanura, masyarakat dan stakeholders telah melakukan suatu komunikasi yang efektif (sosialiasi, koordinasi dan komuniasi), umpan balik yang cepat (keterlibatan dan respon masyarakat dan *stakeholders*), Kepercayaan (memperlihatkan keseriusan dalam membuat program kegiatan) dan kreativitas (memberikan kebebasan untuk berkreasi) (Maulana et al., 2022).

Penelitian tentang "Penerapan *Evidence Based Policy* Dalam Implementasi Program Smart Village" yang berfokus pada :

> Analisis *evidence based policy* dari konsep Pew Mac Arthur menunjukan bahwa dalam fokus program assestment terjadi beberapa perkembangan diantaranya dalam komponen smart governance sudah adanya inovasi pelayanan publik melalui website desa dan media whatsapp. Kemudian Fokus terakhir yaitu *targeted evaluation* dalam hal ini Pemerintah Desa Limpung berfokus pada evaluasi dalam segi peningkatan smart governance dimana perlu dilakukan perbaikan dan penerapan aplikasi terintegrasi dalam hal pelayanan publik setelah dilakukan percobaan pelayanan publik melalui website dan whatsapp (Haniyuhana & Widiyarta, 2023).

Penelitian selanjutnya yaitu "Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)" berfokus pada :

> Pembangunan desa idealnya dapat dilakukan dengan cerdas (*smart*), artinya agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas yang dimaksud adalah dengan mengembangkan desa ke arah desa cerdas (smart village) di Desa Talagasari mencatat bahwa tingkat urbanisasi atau pendatang yang tinggal sementara di desa tersebut, baik itu membuka usaha yang kemudian membawa sekaligus pekerja (karyawan) untuk bekerja di tempat usahanya, ataupun hanya sebagai pengontrak. Dampak selanjutnya yang timbul dari maraknya pendatang yaitu tingkat keamanan desa, bahwa akhir-akhir ini di Desa Talagasari sangat marak terjadi kasus kriminalitas curanmor (pencurian motor). Sehingga menggunakan konsep smart village Konsep Smart village dibutuhkan agar desa-desa tersebut mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien (Huda et al., 2020).

Pada penelitian terkait “Perkembangan Infrastruktur Pasca Pemekaran Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau” berfokus pada :

> Perkembangan infrastruktur desa Teluk Paman Timur yang telah mekar selama 15 tahun, namun perkembangan infrastruktur belum signikfikan dilihat dari perspektif Permendagri Nomor 130/2018 terkait beberapa

faktor seperti : Pengadaan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras lingkungan pemukiman (air minum, drainase dan selokan, sampah, sumur resapan, jaringan kelola air limbah, penerangan lingkungan sekitar. Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan transportasi (jalan pemukiman, jalan poros), Pemeliharaan kesehatan (mandi cuci, pos pelayanan terpadu, sanitasi), serta Pengembangan pendidikan (taman baca masyarakat, bangunan paud, wahana paud) (Jannah & Ramadhan, 2023).

Penelitian selanjutnya yaitu "MODEL SMART VILLAGE UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PERDESAAN" yang berfokus pada pembahasan terkait:

Pembangunan desa yang berkelanjutan dengan menggunakan konsep smart village yang mengacu pada kawasan pedesaan dan komunitas pedesaan yang telah membangun strategi pembangunan berdasarkan aset dan kekuatan yang ada, serta dengan mengejar beberapa peluang baru terkait teknologi digital baru, jaringan, dan layanan. Sedangkan untuk faktor dari pembangunan infrastruktur desa ditinjau dari kemudahan proses produksi lokal, pemberdayaan masyarakat lokal dan perbaikan kondisi kehidupan. Yang termasuk dalam faktor ini adalah unsur infrastruktur teknis, ekonomi, organisasi, dan sosial (Asniati et al., 2024).

Penelitian lain tentang “Innovative Governance dalam Penerapan Smart Village sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)” berfokus pada :

> Penerapan smart village di Desa Kutuh harus sesuai dengan indikator *innovative governance* meliputi lima indikator meliputi: (1) layanan terintegrasi; (2) Desentralisasi; (3) Pemanfaatan kerjasama; (4) keterlibatan warga; (5) Pemanfaatan teknologi. Penerapan smart village di Desa Kutuh sejak tahun 2017 memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan Desa Kutuh, melalui inovasi dalam beberapa sektor seperti ekonomi, administrasi, sosial budaya, lingkungan dan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis temuan, diketahui bahwa indikator desentralisasi pada Pemerintah Desa Kutuh berhasil terpenuhi. Namun untuk lebih mengoptimalkan proses desentralisasi di
>
> Pemerintah Desa Kutuh, masih perlu meningkatkan respon masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, melalui survey kepuasan masyarakat tercatat hanya 117 responden yang mengisi survey tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merespon program-program yang ada (Kasus et al., 2024).

Penelitian terkait “SINERGI ANTARA MAHASISWA KKN DAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI KAMPUNG DALANGAN” yang berfokus pada :

> Smart Village yang ada di Kampung Dalangan diantaranya, bank sampah, *eco enzym*, kampung organik, dan pemanfaatan mijel (minyak jelantah). Smart Village yang diciptakan di daerah Kampung Dalangan memberikan manfaat bagi masyarakatnya dan juga masyarakat di luar Kampung Dalangan. Sinergi antara mahasiswa KKN dan masyarakat dalam penerapan konsep Smart Village di Kampung Dalangan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Smart Village yang diciptakan di daerah Kampung Dalangan memberikan manfaat bagi masyarakatnya dan juga masyarakat di luar Kampung Dalangan. Beberapa masyarakat luar berkunjung untuk mendapatkan hasil atau produk yang diciptakan oleh masyarakat Kampung Dalangan (Village & Kampung, 2024).

Penelitian selanjutnya tentang "PENGARUH PENERAPAN KONSEP SMART VILLAGE TERHADAP PEMBANGUNAN DI PEKON SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG" berfokus pada :

> Pelaksanaan smart village di pekon Suka Negeri Jaya dimulai sejak tahun 2020, perkembangannya sudah merata karena kita sudah memasang internet gratis untuk satu desa. Keberhasilan ini tak lain karena kita gencar melakukan sosialisasi tentang program smart village ini. Untuk semua pilar yang ada, semuanya sudah diterapakan dan warga sudah merasakan perkembangannya sejak pekon menerapkan semua pilar ini. Salah satu pilar yaitu smart economi seperti yang diketahui produk unggulan pekon Suka Negeri Jaya adalah alat-alat

pertanian dan tirai-tirai yang dibuat oleh ibu-ibu PKK (Maharani & Sulistio, 2024)

Penelitian terkait "Smart Village Application untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Desa Katonsari Kabupaten Demak" berfokus pada :

> Pemerintah Desa Katonsari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Saat ini, pelayanan publik masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pelayanan. Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem smart village application yang dibuat dibatasi pada 8 layanan surat keterangan pada awal implementasi. Smart village application yang sudah jadi ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut.
>
> Meskipun literasi digital peserta sangat beragam dan cenderung kurang, peserta kegiatan tetap antusias dalam menyimak materi dan aktif dalam pelatihan penggunaan aplikasi (Haris et al., 2023).

Penelitian terakhir terkait "Akselerasi penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi" berfokus pada :

> Beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam digitalisasi desa antara lain: 1) Ketersediaan infrastruktur teknologi 2) Literasi digital rendah 3) Kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi digital 4) Keandalan dan perawatan teknologi 5) Keterbatasan finansial. Program Studi Ilmu Pemerintahan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam

> pemerintahan (*e-government*) pada tingkat desa di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa masih ada delapan desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang belum memiliki website desa. Di samping itu, desa yang sudah memiliki website sebagian besar masih menggunakan jasa rekanan dalam pengembangan dan hosting websitenya. Kegiatan pengabdian menerapkan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang fokusnya adalah pembelajaran kolaboratif untuk mengatasi masalah praktis dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan (Sagala et al., 2024)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu terkait penerapan Smart Village, penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan serta hasil dari konsep Smart Village di desa terkait dan tidak banyak membahas terkait bagaimana keterbukaan informasi publik. Hal ini juga bisa dilihat dari latar belakang sejarah desa tersebut, telah berdiri ataupun telah mengalami pemekaran lebih dari 5 tahun, sehingga pembangunan berkonsep Smart Village sudah diterapkan di desa tersebut.

Pembangunan infrastruktur yang menggunakan basis Smart Village diperlukan oleh sebuah desa dalam memudahkan sistem pemerintahan desa yang efektif dan efisien seiring dengan kebutuhan akan informasi yang lengkap, akurat dan memiliki tingkat keterbukaan informasi (transparansi) yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan publik. Desa pemekaran sebagai desa yang akan memulai masa transisi menjadi desa definitif (mandiri) tentu perlu melakukan persiapan baik dari segi sosial

maupun infrastruktur desa. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendukung kesiapan desa pemekaran ke arah desa yang inovatif dan maju dan mandiri.

Sejauh ini, belum ada penelitian terkait kesiapan desa pemekaran dalam menerapkan konsep Smart Village dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan desa khususnya dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan kajian mendalam terkait konsep kesiapan desa dalam penerapan Smart Village tersebut.

Permasalahan diatas menjadi landasan penulis untuk meneliti bagaimana kesiapan desa pemekaran Kasang Kebon Dalam untuk menerapkan konsep pembangunan berbasis Smart Village, dengan judul penelitian **"ANALISIS KESIAPAN DESA PEMEKARAN DITINJAU DARI ASPEK PEMBANGUNAN BERBASIS SMART VILLAGE Studi Kasus : Desa Kasang Kebon Dalam".**

1.1 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan Smart Village dalam pemekaran Desa Kasang Kebon Dalam sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta sebagai bentuk kesiapan Desa Kasang Kebon Dalam menjadi desa yang berkonsep Smart Village. Sehingga penulis mendapatkan rumusan masalah:

a. Bagaimana bentuk kesiapan desa Kasang Kebon Dalam menerapkan Smart Village dalam pembangungan desa khususnya pada keterbukaan informasi?

b. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat menuju kesiapan Desa Kasang Kebon Dalam untuk menerapkan konsep pembangunan desa berbasis Smart Village pada penerapan prinsip keterbukaan informasi publik?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Untuk melihat sejauh mana kesiapan penerapan Smart Village di desa pemekaran Kasang Kebon Dalam untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi di desa
b. Untuk mengindentifikasi faktor apa saja yang bisa mendukung kesiapan Desa Kasang Kebon Dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari penerapan Smart Village pada prinsip keterbukaan informasi.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya tentang bagaimana bentuk dari kesiapan sebuah desa pemekaran dalam menerapkan Smart Village dalam pembangunan Desa Kasang Kebon Dalam, sekaligus menjadi desa maju serta dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Pemerintahan dalam menganilisis kesiapan sebuah desa pemekaran menerapkan sistem Smart Village.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam melihat identifikasi kesiapan pembangunan dari desa pemekaran Kasang Kebon Dalam untuk

menerapkan Smart Village, sebagai bahan serta langkah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih merata khususnya pada penerapan prisip keterbukaan informasi.

1.4 LANDASAN TEORI

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaks (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan menggunakan data empiris yang dapat diamati) yang berfungsi sebagai wahana untuk mengamati dan menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar. Teori tersusun dari asumsi, proposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan, dan atau teorema (generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris) (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023). Untuk melakukan analisis terhadap penelitian tersebut, penulis menggunakan teori yang relevan dan tepat supaya memudahkan peneliti pada saat melakukan penelitian.

Smart Village merupakan salah satu konsep ataupun program desa yang terintegrasi dengan teknologi dan komunikasi yang dirumuskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kaitan antara Ilmu Pemerintahan sendiri dengan penerapan Smart Village yaitu pada tata kelola pemerintahan serta penerapan e-governance yang terintegrasi dengan tekonologi sehingga desa bisa menerapkan serta memanfaatkan program Smart Village tersebut.

Penulis menggunakan teori-teori yang digunakan dalam rangka memperkuat serta menjadi arah pedoman pada penelitian yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Teori Smart Village

Menurut Hasan (2021) smart village merupakan suatu desa yang secara inovatif menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam penerapannya tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga dapat mengembangkan potensi desa dalam berbagai bidang, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis teknologi dan informasi (Maulana et al., 2022).

Smart Village menurut (Anang Dwi Santoso. dkk, 2019) Dalam buku yang berjudul "Desa Cerdas : Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0" mengklasifikasikan :

a. Smart Governance

1) Partisipasi (Partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan)
2) Transparansi (Keterbukaan Informasi)
3) Pelayanan Publik dan Sosial (Pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat)

b. Smart Economy

1) Inovasi (Semangat inovasi, kemampuan transformasi, dana publik untuk pengembangan riset)
2) Kewirausahaan (Citra dan merk dagang, produktivitas, pasar tenaga kerja yang fleksibel, keterkaitan multi-aktor)
3) Pelayanan Publik dan Sosial (Pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat)

c. Smart Mobility

1) Lalu Lintas
2) Transportasi Publik (Aksebilitas lokal, sistem transportasi yang aman, inovatif dan berkelanjutan)
3) Infrastruktur
4) TIK (Ketersediaan infrastuktur TIK)

d. Smart Environment

1) Efisiensi Energi (Kondisi alam, pengendalian pencemaran) emantauan dan Jaringan Lingkungan (Perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan)

e. Smart People

1) Edukasi Digital (Penguasaan digital, keterbukaan)
2) Kreativitas (Fleksibel, keinginan untuk terus belajar dan berkembang, pluralitas etnik dan sosial, partisipasi dalam kehidupan bersama)

f. Smart Living

1) Kesehatan dan Keamanan (Keamanan individu, kualitas pemukiman, kondisi kesehatan, fasilitas pendidikan)
2) Akses Teknologi

g. Smart Tourism

1) Fasilitas dan Atraksi Wisata (Atraksi, interaksi wisata, ekonomi smart tourism).

1.5.2 Smart Governance

Smart Governance adalah perwujudan pemerintah desa yang telah memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah desa yang transparan, terbuka

akan informasi sertadapat mengelola dana dengan tepat dan efektif itu lah beberapa hal yang termasuk dalam pelayanan publik (Wicaksana & Rachman, 2022).

Sedangkan menurut (Scholl & Scholl, 2014), menyatakan bahwa :

"Smart governance infrastructure, which is seen as an agglomerate of hard and soft elements such as norms, policies, practices, information, technologies, skills, and other resources. When developing smart governance infrastructures, several key factors have been identified such as problem focus, feasibility/ implementability, stakeholders' contributability, continued engagement, coordination, and access to open data."

Menurut pendapat dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Smart Governance mencakup adanya kebijakan, praktik, keterbukaan informasi (transparansi), penggunaan teknologi, serta keterampilan sumber daya manusia. Dalam mengembangkan infrastruktur penerapan Smart Governance, beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan seperti fokus masalah, kelayakan/implementasi, kontribusi pemangku kepentingan, keterlibatan berkelanjutan, koordinasi, dan akses ke data terbuka. Oleh karena itu, fokus pada penelitian ini adalah pada indikator keterbukaan informasi (transparansi).

Adapun beberapa indikator dalam mengukur keterbukaan informasi menurut Dwiyanto yaitu :

a. Pengukuran tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan layanan publik

Dimana penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan

pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna.

b.Kemudahan akan memahami peraturan dan prosedur

Dimana memahami segala aspek penyelenggaraan pelayanan juga menjadi tugas para penyelenggara pelayanan. Hal ini agar mampu menjelaskan mengapa prosedur dan ketentuan dalam pratik pelayanan dibuat sebagaimana adanya.

c. Kemudahan memperoleh akses informasi (digital)

Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Begitu pula ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan cara memperoleh pelayanan dapat diperoleh dengan mudah oleh para pengguna, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi (Maani Dt, 2009).

1.5 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka berpikir memuat variabel-variabel yang akan diteliti beserta indikatornya (Pandapotan Sitompul, Watalina Sihombing, 2024). Kerangka berpikir dimulai dengan apa yang menjadi topik permasalahan dari penelitian tersebut yaitu apa saja yang menjadi bentuk kesiapan dari desa pemekaran dalam menerapkan pembangunan berbasis smart village, sampai pada penentuan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

Pada bagian ini, penulis memfokuskan permasalahan terkait bagaimana kesiapan desa pemekaran Kasang Kebon Dalam untuk memberikan keterbukaan informasi

kepada masyarakat desa. Dengan penggunaan dimensi Smart Village dalam melihat bentuk kesiapan desa tersebut serta menggunakan teori Smart Governance yang berfokus pada keterbukaan informasi, sehingga dalam menilai kesiapan tersebut, penulis menggunakan beberapa indikator yaitu Pengukuran tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan layanan publik, Kemudahan akan memahami peraturan dan prosedur serta Kemudahan memperoleh akses informasi (digital). Sehingga menghasilkan judul penelitian "Analisis Kesiapan Desa Pemekaran Ditinjau Dari Aspek Pembangunan Berbasis Smart Village."

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

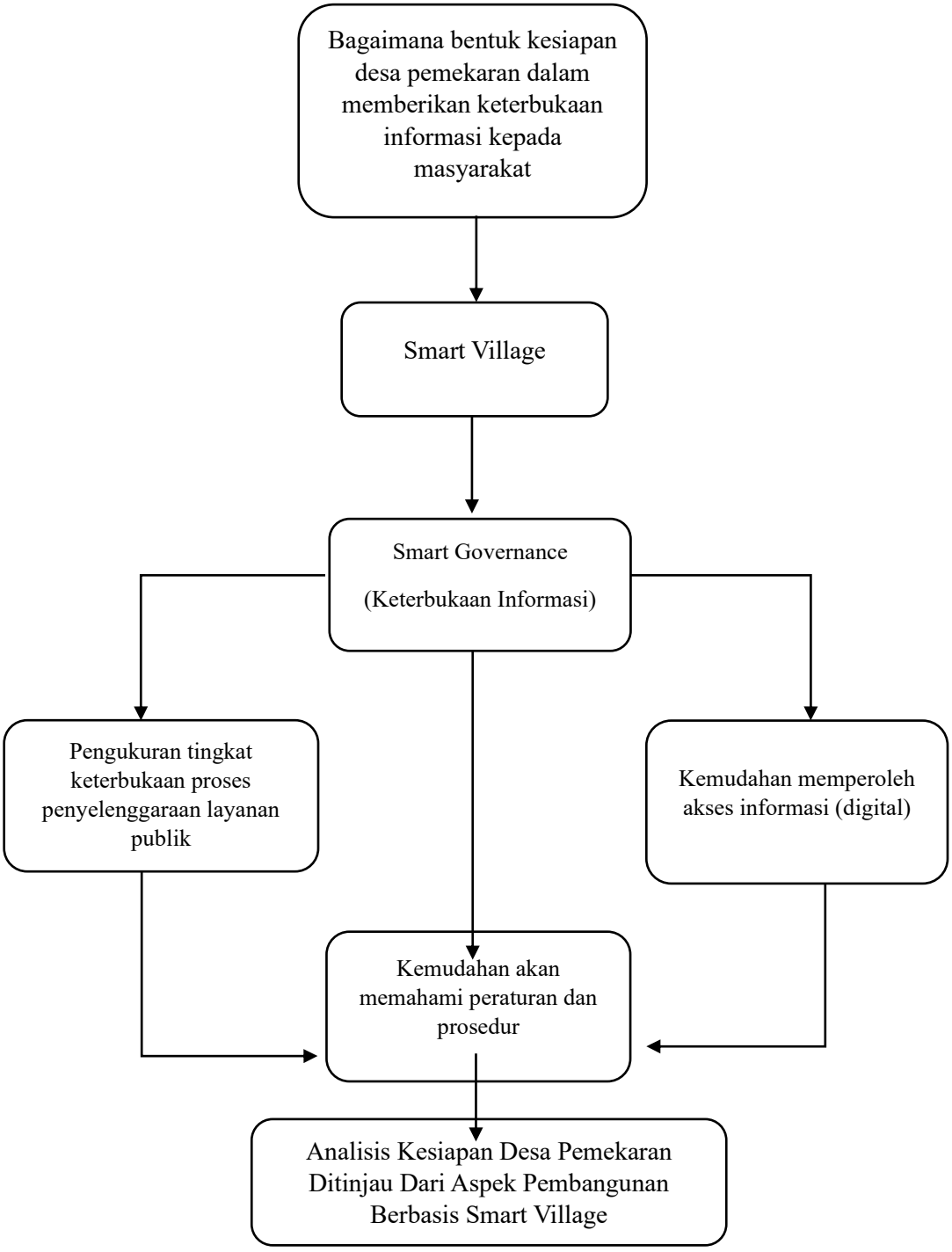

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kerangka landasan untuk terciptanya pengetahuan yang ilmiah. Dalam ilmu sosial budaya, dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan (eksperimen, generalisasi, dan verifikasi) juga dilakukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang ilmu sosial dan pengetahuan budaya agar memperoleh hasil-hasil penelitian tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dijalankan (Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap et al., 2023).

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam proses pelaksanaan penelitiannya banyak menggunakan teknik wawancara. Dalam pemaparannya penelitian kualitatif lebih banyak menampilkan dan memaknai angka-angka disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

Creswell J.W, mengartikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian untuk memahami masalah manusia ataupun sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks serta disajikan dengan kata-kata, dilaporkan dengan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi dengan latar belakang alamiah (Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap. et al., 2023). Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mengkaji, mengamati, mendalami dan mencari lebih jauh terkait fenomena, gap permasalahan maupun gejala sosial yang terjadi di sekitar. Dengan

menggunakan pendekatan dan teori yang diimplementasikan untuk melihat serta mendapatkan hasil kesimpulan yang konkret dan ilmiah dari fenomena maupun gejala sosial yang akan diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang di mana peneliti memberikan gambaran dari sudut apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi dalam lingkungan sosial secara objektif dan interaktif serta hasil dari perbandingan variabel mandiri peneliti dengan variabel mandiri lainnya. Dengan metode deskriptif, membantu peneliti dalam memperoleh data yang valid serta mampu untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan desa pemekaran dalam menerapkan pembangunan desa berbasis Smart Village khususnya pada prinsip keterbukaan informasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kasang Kebon Dalam, Kecamatan Kumpeh Ulu. Dengan mengambil studi kasus kesiapan desa pemekaran Kasang Kebon Dalam menerapkan konsep pembangunan berbasis Smart Village khususnya pada prinsip keterbukaan informasi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana melihat faktor kesiapan desa pemekaran dalam menerapkan dan memajukan pembangunan menggunakan konsep Smart Village. Melalui konsep Smart Village, desa pemekaran bisa menjadi desa yang berindeks maju, serta menjadi desa yang siap dengan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan yang transparan dan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat.

1.7.4 Sumber Data

Menurut Edi Riadi, Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Sari & Zefri, 2023). Sumber data terdiri atas 2 kelompok yaitu :

a) Data Primer, merupakan data yang bisa diperoleh secara langsung melalui tahapan dimulai dari observasi dan wawancara yang nantinya data tersebut akan dikumpulkan sebagai narasi hasil penelitian dan,

b) Data Sekunder, merupakan data yang bisa diperoleh secara tidak langsung dari studi literatur, pengambilan data melalui sumber data lainnya. Seperti dokumen perencanaan desa, laporan perkembangan dan anggaran desa kepada desa induk.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti telah menentukan informan untuk diwawancarai sesuai dengan pengalaman maupun konsentrasi terkait pencarian data penelitian Strategi tersebut, namun bisa bergeser seiring dengan kebutuhan data. Informan tersebut terdiri dari a) Informan utama yaitu Kepala Desa Kasang Kebon Dalam b) Kaur Pemerintahan Desa Kasang Kebon Dalam dan c) Biro Administrasi dan Pelayanan Desa Kasang Kebon Dalam serta d) Masyarakat Desa Kasang Kebon Dalam.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data juga merupakan suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama

metode dan teknik analisis data (Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap. et al., 2023) . Teknik Pengumpulan data ada 3 proses yaitu :

a. Teknik Pengamatan/Observasi

Peneliti menggunakan teknik pengamatan terbuka di mana peneliti melihat kondisi dari pembangunan/infrastruktur yang telah dibangun di desa pemekaran tersebut kemudian menarasikan kembali menjadi data sekunder dan data pelengkap dalam menyusun lembar pertanyaan untuk proses wawancara selanjutnya. Langkah observasi yang dilakuan berupa mengamati terkait dengan langkah langkah kesiapan desa pemekaran dalam pembangunan berbasis smart village. Selain itu, juga mengobservasi bagaimana kesiapan desa dalam pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengakses informasi desa yang diperlukan sehingga prinsip keterbukaan informasi dapat berjalan baik.

b. Teknik Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono merupakan berdialog dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak seperti pewawancara *(interview)* yang memberikan pertanyaan kepada yang diwawancarai *(interviewer)* untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Benny et al., 2021). Peneliti dalam melakukan teknik wawancara menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu kompromi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang dimana Peneliti telah menyiapkan tema dan daftar pertanyaan kepada responden sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan, yaitu Kepala Desa pemekaran sebagai pemimpin utama yang mengetahui sejarah perkembangan desa, kemudian Kaur Pemerintahan desa

pemekaran sebagai penanggung jawab serta membuat perencanaan yang akan dilaksanakan di desa pemekaran. Namun, peneliti bisa menggali pertanyaan lebih dalam ataupun menambahkan pertanyaan lain selain di dalam daftar wawancara ketika akan melakukan wawancara kepada biro administrasi dan pelayanan desa pemekaran yang mencatat sekaligus pengguna langsung dari penerapan pembangunan smart village, serta Masyarakat desa yang menjadi subjek utama dalam melihat bagaimana bentuk keterbukaan informasi desa kepada masyarakat apakah sudah terlaksana, agar mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat sesuai kondisi kesiapan desa.

c. Teknik Dokumentasi

Memiliki arti yaitu catatan peristiwa baik yang telah terjadi maupun baru terjadi. Penulis menggunakan teknik dokumentasi pengambilan gambar (foto) terkait kondisi pembangunan/infrastruktur yang ada di desa tersebut kemudian dokumen tertulis terkait laporan penyelenggaraan pembangungan desa pemekaran yang diajukan kepada desa induk.

d. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam merekam data (informasi) yang dibutuhkan (Millah et al., 2023). Peneliti menggunakan beberapa jenis teknik analisis data seperti :

1) Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk wawancara terkait bagaimana kesiapan dari desa pemekaran dalam menerapkan Smart Village. Bertujuan agar peneliti memperoleh informasi atau

tanggapan langsung dari informan terkait Smart Village di desa tersebut. Sebelumnya, peneliti menentukan informan yang berwenang terhadap kebutuhan informasi penelitian, serta peneliti menyiapkan pertanyaan wawancara yang akan diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang menjadi kunci utama proses hasil penelitian.

2) Reduksi Data

Peneliti mempertajam jawaban dari para responden dengan memilih dan membuang jawaban yang tidak atau kurang diperlukan, serta menyusun data mentah atau daftar pertanyaan ke dalam bentuk transkrip agar kesimpulan akhir dapat dinarasikan dengan baik (Rafa Basyirah & Fuad, 2023).

3) Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengkaji ulang hasil penelitian di lapangan dari penelitian awal hingga akhir penelitian kemudian mencocokkan atau melihat bukti penelitian lain yang mendukung jika ada, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terkait bagaimana kesiapan desa pemekaran dalam menerapkan Smart Village.

1.7.6 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada guna memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi kemudian mengumpulkan data melalui metoda yang berbeda, oleh kelompok berbeda

dan dalam populasi berbeda, hasil temuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal (Susanto et al., 2023).

Menurut Norman K. Denkin dalam (Susanto et al., 2023), trianggulasi data dibedakan menjadi empat jenis yaitu :

a. Triangulasi Metode

   Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda dengan peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Dengan metode tersebut, peneliti bisa mewawancarai narasumber lain dengan menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mencari kebenaran/fakta lebih mendalam.

b. Triangulasi Antar-Peneliti

   Triangulasi antar-peneliti memiliki arti bahwa mencari kebenaran data dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam analisis dan pengumpulan data. Peneliti lain yang terlibat harus benar-benar mempunyai pemahanan atau pengalaman terkait dengan pengumpulan data yang akan diambil. Hasil atau bukti dari analisis berupa penggunaan penelitian terdahulu dengan mengambil topik yang sama terkait Smart Village dan memunculkan pandangan berbeda sehingga memunculkan fakta/bukti yang lebih meluas.

c. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memiliki arti triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data atau mencari kebenaran data menggunakan sumber data lain seperti dokumen tertulis, hasil wawancara dengan narasumber lain serta hasil obervasi peneliti ketika berada di lokasi penelitan.